



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Merkatkan Pemprov-DPRD DKI

Fransiskus Wisnu Wardhana Dany

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menyambangi fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Kunjungan paling cepat sebelum 15 Desember 2022 ini diharapkan merekatkan kembali kerja sama kedua lembaga demi kepentingan warga Ibu Kota.

Heru diminta menyambangi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta saat rapat pengesahan APBD tahun 2023, Selasa (29/11/2022). Atas permintaan tersebut, ia menjadwalkan kunjungan paling cepat 15 Desember 2022 karena beberapa anggota DPRD masih di luar kota.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuturkan, kunjungan ke fraksi-fraksi sangat penting untuk membangun harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Hal ini meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam penguatan peran eksekutif dan legislatif sesuai tugas pokok fungsinya.

"Faktor ini (harmonisasi) yang selama lima tahun belakangan terabaikan. Namun, kami berharap kunjungan jangan hanya basa-basi," kata Gembong pada Kamis (8/12).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengharapkan kunjungan ke fraksi-fraksi mampu menjembatani harapan besar masyarakat yang dibawa oleh anggota Dewan saat masa reses. Harapan besar itu sekiranya dapat dikordinasikan oleh Heru agar dieksekusi melalui perencanaan program yang menyentuh kebutuhan dasar warga Jakarta.

Hal itu senada dengan penasihat Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Ia menyambut rencana kunjungan Heru ke fraksi-fraksi supaya terjalin komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

"Penjabat Gubernur diputuskan oleh Presiden atas usulan dari sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta. Kami berharap komunikasi ini penting untuk menjaga sinergitas," kata Mujiyono secara terpisah.

Pertemuan bersama

Rencana kunjungan ke fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta ini dinandani sebagai upaya koordinasi lanjutan dalam mengeksekusi APBD 2023 sebesar Rp 83,78 triliun. Akan tetapi, relasi kerja antara Heru dan DPRD DKI Jakarta akan lebih tepat jika dibicarakan secara terbuka melalui forum pertemuan bersama.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lucius Karus, mengatakan, kekhawatiran adanya lobi-lobi dalam kunjungan ke fraksi-fraksi setelah ketuk palu APBD merupakan hal lumrah. Namun, secara prosedural sudah tidak memungkinkan untuk lobi-lobi lantaran APBD sudah sah.

"Sowan ini untuk koordinasi lanjutan dalam

mengeksekusi APBD pada waktunya. Meski begitu, seharusnya hal-hal terkait relas kerja lebih tepatnya dibicarakan secara terbuka melalui forum pertemuan bersama di DPRD," kata Lucius, Kamis sore.

Selain pertemuan bersama Penjabat Gubernur juga bisa mengundang pimpinan fraksi ke Balai Kota. Tujuannya agar tidak menimbulkan kecurigaan karena pertemuan dilakukan secara terbuka.

APBD DKI Jakarta tahun 2023 terdiri dari pendapatan daerah Rp 74,38 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 9,40 triliun. Alokasinya untuk belanja daerah Rp 74,61 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 9,16 triliun.

APBD fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi 41,27 persen melalui belanja dan penyertaan modal daerah. Ketiganya adaah pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Tiga prioritas APBD DKI Jakarta 2023 sudah sesuai dengan kebutuhan warga. Namun, butuh kontrol anggaran supaya konsisten antara program dan belanja komponen.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Ha-

san menyebutkan, besaran APBD sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun, jangan dulu terkecoh karena anggaran harus dikontrol, mulai dari rincian hingga komponen. Sebab, kerap ditemukan inkonsistensi antara program dan belanjanya.

"Beberapa program yang dikembangkan untuk pengendalian banjir juga ada yang tidak efektif, misalnya pembuatan sumur biopori yang tidak efektif," kata Misbah.

Cara Heru

Bertemu langsung dengan berbagai pihak menjadi langkah Heru sejak pertama kali menjadi Penjabat Gubernur DKI, Senin (17/10).

Heru, misalnya, kembali membuka posko aduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI. Menurut dia, hal tersebut agar berbagai problematika publik yang selama ini kurang teratasi via pengaduan daring dapat segera menemukan solusi. Di Balai Kota DKI, Heru memfasilitasi warga dengan aparat sipil negara dari berbagai dinas dan suku dinas di setiap kota dan kabupaten.

Heru yang masih menjadi Kepala Sekretariat Kepresidenan RI tersebut juga aktif bertemu dengan banyak sosok penting lain yang terkait dengan proyek pembangunan di DKI. Salah satu yang ditemui adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mempercepat proyek penanggulangan banjir Jakarta.

Sejauh mana anjangan Heru membuahkan hasil baik bagi DKI? Publik dapat mengetahuinya dengan terus ikut memantau kinerja Heru hingga 2024.